



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku

- Abdul Manan Winarta, 2008, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta.
- Ahmad Mujahiddin, 2012, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ahmad Mujahidin, 2012, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Amzulian Rifa'I dan Suryanto, 2006, *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama mewacanakan Fikih Anti Korupsi*, Gama Media, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, cetkan ke 11, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arin Swandari, 2019, *KPK Berdiri Untuk Negeri*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Astim Riyanto, 2000, *Teori Konstitusi*, Yapemd, Bandung.
- Bahrussam Yunus (Editor), Tanpa Tahun, *Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*, UII Press, Cetakan Pertama, Yogyakarta.
- Bambang Sutiyoso, 2009, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa Di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta.
- Dandy Sugono, 2008, *Kamus Bahasa Indonessia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Diana Napitupulu, 2010, *KPK In Action*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Fadzlun Budi Sulistyo Nugroho, 2019, *Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Law Review*, Gorontalo.
- Farid Wajdi dan Andryan, 2022, *"Hukum dan Kebijakan Publik"*. Sinar Grafika, Jakarta Timur.



- Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Cetakan Kedua*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2011, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2016, *perkembangan & Konsolidasi Lembaga Nrgara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Khelda Ayunita & Abd Rais Asman, 2016, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV Maju Mundur, Bandung.
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Mahmud Hadi Riyanto dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, Tanpa Tahun, “*Asas-Asas Putusan Hakim.*” NTT.
- Mahmudin, Tanpa Tahun, *Jalan Panjang Menuju KPTPK*, Gerakan Anti Korupsi (GeRaK), Jakarta.
- Maria Farida Indrati, 2011, *Ilmu Perundang Undang-Undangan 1, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Cetakan ke-6, Kanisius, Jakarta.
- Muchamad Ali Safaat, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Mukti Arto, 1996, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.



- Nimatul Huda dan R Nazriyah, 2011, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusa Media, Bandung.
- Nimatul Huda, 2011, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Padmo Wahjono, 1992, *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Pranadamedia Group, Jakarta.
- Prajudi Admosudirjo, 1998, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, cet.9. Jakarta.
- Putera Astomo, 2014, *"Hukum Tata Negara"*, Thafia Media, Yogyakarta.
- R. Abdoel Djamali, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Raihan A Rasyid, 1998, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rudy Cahya Kurniawan, 2021, *Pengaturan Kewenangan KPK Dan Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Setiawan Widagdo, 2012, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Srimamuji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1984, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta.
- Tim Penyusun, 2021, *Panduan dan Pedoman Penulisan skripsi (edisi Revisi)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan.
- Yahya Harahap, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafik, Jakarta.



Zainal Arifin Mochtar, Tanpa Tahun, *Lembaga Negara Independen (Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi)*, Raja Grafindo, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Sunar Grafika, Jakarta.

b. Disertasi

A. Hamid S. Atamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, (Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I- Pelita IV), Disertasi Doktor Universitas Indonesia, dalam Ahmad Syahrizal, Peradilan Konstitusi, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.

c. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

d. Majalah

Faiz, Pan Mohammad, *Relevansi Doktrin Negative Legislator*, Majalah Konstitusi No. 108. Jakarta,



e. Jurnal

- Selfi Suryadinata dan Ananda Putra Rezeki, “*Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Ditinjau dari Perspektif Hukum Ketatanegaraan, Jurnal, Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Volume 3, Nomor. 2, 2021
- Moh Rizaldi, “*Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen*”, dalam jurnal Penelitian Universitas Kuningan, Volume 12, Nomor 1, 2021
- Nanang Sri Darmani, “*Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II, Nomor 2, Mei-Agustus 2015
- Muhamad Ari Abdillah, dkk. “*Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Negara dalam Perspektif Konsep Trias Politica*” Dalam Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Volume 2, Nomor 1, 2019
- Gardha Galang Mantara Sukma. “*Open Legal Policy Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017)*”. Jurnal Lex Renaissance, Volume 5, Nomor 1, Januari 2020
- Fetroki Romando, Asas Non Retroaktif dan Penyimpangannya Dalam Hukum Di Indonesia, Jurnal Hukum Unair, 2007
- Muchamad Lufti Hakim dan Rasji, “*Penerapan Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Negative Legislator*”, Jurnal Hukum Adigama, 2018
- Agus Raharjo, *Problematika Asas Retroaktif Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum, Volume 8, Nomor 14, 2008
- Bachtiar, “*Pemberlakuan Asas Retroaktif Dalam Optik Hukum Tata Negara*. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, Volume 2, Nomor 2, 2015



Resma Bintani Gustaliza & Tasyah Roma Arta, “*Analisis Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Kpk Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/Puu-Xx/2022*”, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Volume 6 Nomor 1, Juni, 2023

Lusy Liany Kurniawati & Ika, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Hukum, 2019

Alya Anira Nugraha, Xavier & Risdiana Izzaty, *Constitutional Review Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011, Dari Negative Legislator Menjadi Positive Legislator*. Jurnal RechtIdee, 2020

f. Internet

<https://www.mkri.id>.

<https://talenta.usu.ac.id/rslr>

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-keadilan>.

<https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/112>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/memahami-arti-putusan-mk-bersifat-final>]

[https://id.m.wikipedia.org/Undang-](https://id.m.wikipedia.org/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945)

[Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945](https://id.m.wikipedia.org/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945)

tps://berkahts.dpr.go.id/puspanlakuu/info-judicialreview/info_judicial_review-public-156.pdf.

<https://indonesiabaik.id/mengenal-kewenangan-dan-kewajiban-mahkamah-konstitusi>.